

KUMPULAN ANALISIS

SIKLUS PEMBAHASAN
NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2024

MITRA KOMISI IV

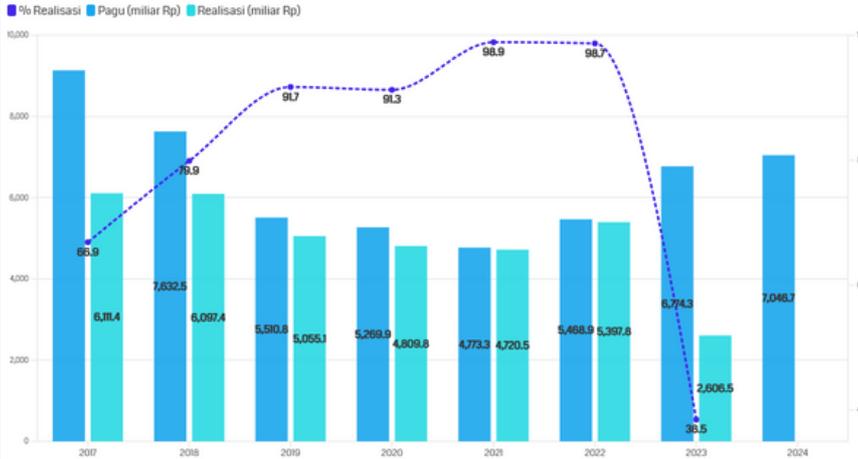


BUDGET HIGHLIGHTS

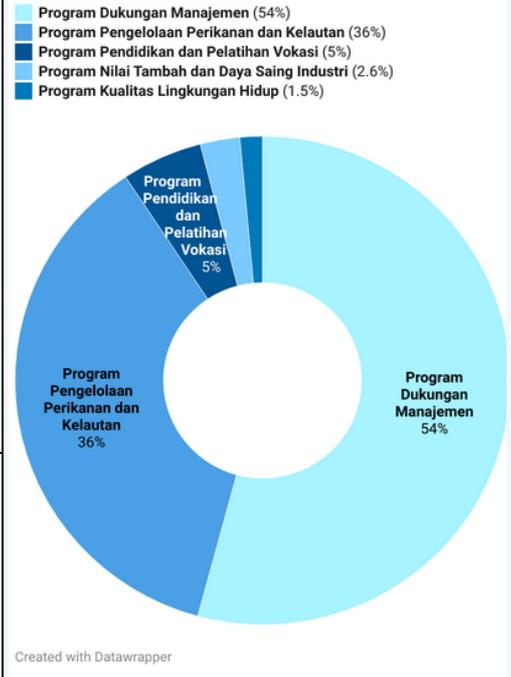
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP)
BA 032

RAPBN TA 2024
Rp7.046,7 miliar

Perkembangan Pagu dan Realisasi

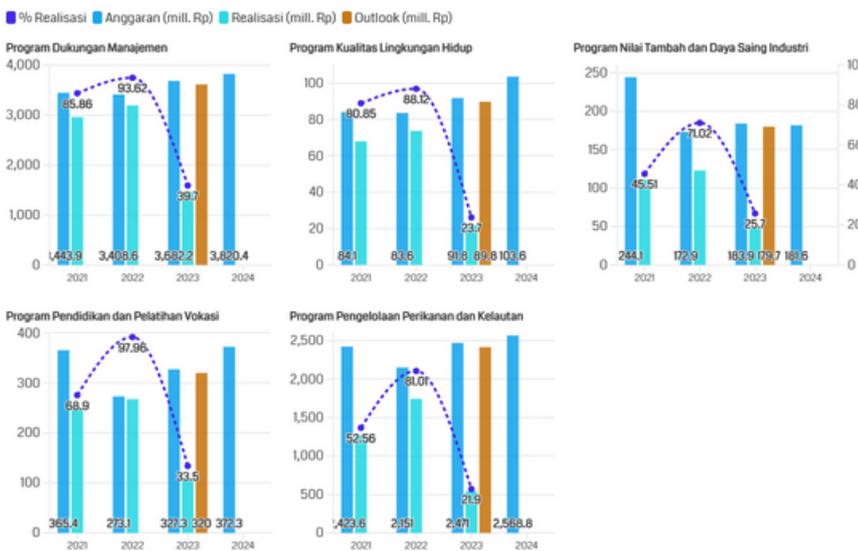


RAPBN 2024 Berdasarkan Program



Sumber:
 • Kemenkeu, 2023. Nola Keuangan RAPBN TA 2024
 • Kemenkeu, 2023. Himpunan RKAKL TA 2024
 • Kemenkeu, Data Rincian APBN, berbagai tahun
 • Kemenkeu, 2023. Laporan Realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN TA 2023

Perkembangan Anggaran dan Realisasi per Program



Sumber: Kemenkeu, 2023-2024 • Angka realisasi 2023 merupakan realisasi hingga semester I TA 2023.

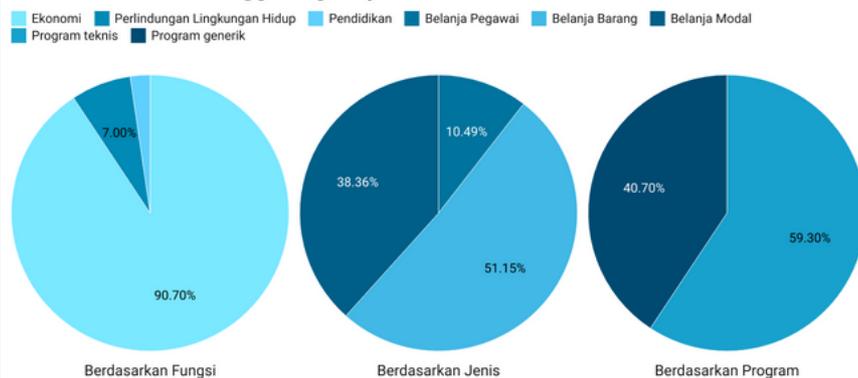
Perkembangan Pagu Anggaran Berdasarkan Program

dalam miliar Rupiah

| Tahun | Program Dukungan Manajemen | Program Kualitas Lingkungan Hidup | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan |
|-------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| 2021 | 3.443,9 | 84,1 | 244,13 | 365,44 | 2.423,63 |
| 2022 | 3.408,63 | 83,63 | 172,9 | 273,08 | 2.151 |
| 2023 | 3.682,15 | 91,81 | 183,85 | 327,3 | 2.471,05 |
| 2024 | 3.820,4 | 103,6 | 181,6 | 372,3 | 2.568,8 |

Created with Datawrapper

Alokasi 2023 dan Penggolongannya



Created with Datawrapper

Alokasi APBN 2023 Berdasarkan Eselon I



Created with Datawrapper

Capaian dan Target Output Prioritas 2019-2024

■ Realisasi/Capaian ■ Target



Sumber: Kemenkeu, 2023 (Himpunan RKA K/L TA 2024)

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama

■ % Realisasi ■ Target ■ Realisasi/Capaian



Sumber: Renstra KKP 2020-2024; Lakin KKP Tahun 2020-2022; BPS; 2023 • Angka realisasi 2023 merupakan realisasi hingga semester I 2023.



Review Belanja Program Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024

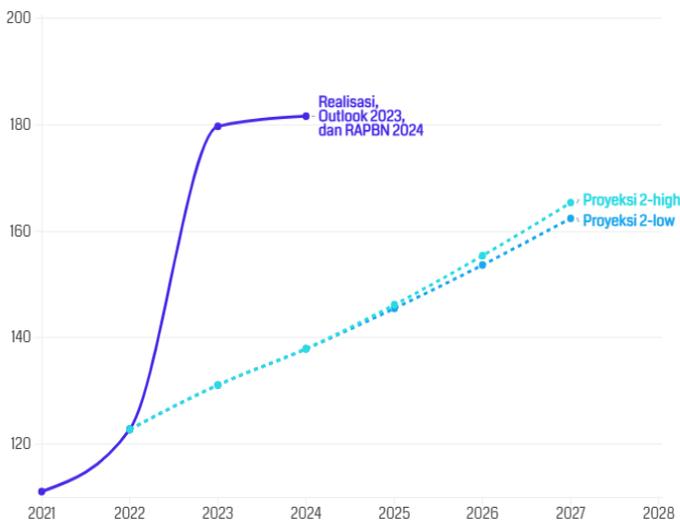
oleh

Marihot Nasution, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Kajian ini mereview penentuan kebijakan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2024. Review dilakukan dengan menghubungkan pencapaian target jangka menengah instansi yang ditetapkan melalui rencana strategis (Renstra) kementerian/lembaga (K/L), dan melakukan penghitungan proyeksi biaya kebijakan berdasarkan target renstra K/L; membandingkan antara anggaran pagu RAPBN 2024 dan proyeksi biaya kebijakan; serta mengkaji kebijakan yang ditetapkan oleh K/L untuk menguji komitmen dan konsistensinya dalam mencapai target pembangunan.

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Sebesar Rp181,6 miliar – Realisasi Anggaran Selalu Lemah

Gambar 1. Proyeksi Belanja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri



Source: Kemenkeu, 2023. NK RAPBN 2024, data diolah

Alokasi TA 2024 adalah sebesar Rp181,6 miliar bertambah sebesar Rp1,9 miliar dari outlook TA 2023. Anggaran ini menurun dari angka APBN 2023 sebesar Rp183,85 miliar. **Program ini memiliki realisasi yang lemah (kurang dari 90%) sejak 2021, dimana persentase realisasi anggaran sebesar 45,51% pada 2021 dan 71,02% pada 2022.** Realisasi di semester 1 TA 2023 pun hanya sebesar Rp47,2 miliar (25,7% dari APBN 2023). Meskipun realisasinya rendah pada tengah tahun pertama 2023, KKP optimis anggaran tahun ini dapat terserap optimal. Dengan dasar itu, alokasi APBN TA 2024 pun meningkat.

Meskipun demikian, realisasi yang rendah ini membuat alokasi anggaran 2024 tampak terlalu tinggi. Dengan mendasarkan proyeksi pada realisasi tahun 2021 dan 2022, belanja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri berada pada angka Rp137,92 miliar, jauh lebih rendah dari alokasi RAPBN 2024 Rp181,60 miliar. Dengan jumlah anggaran tersebut, **KKP perlu memiliki strategi inovatif dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelautan dan perikanan.**

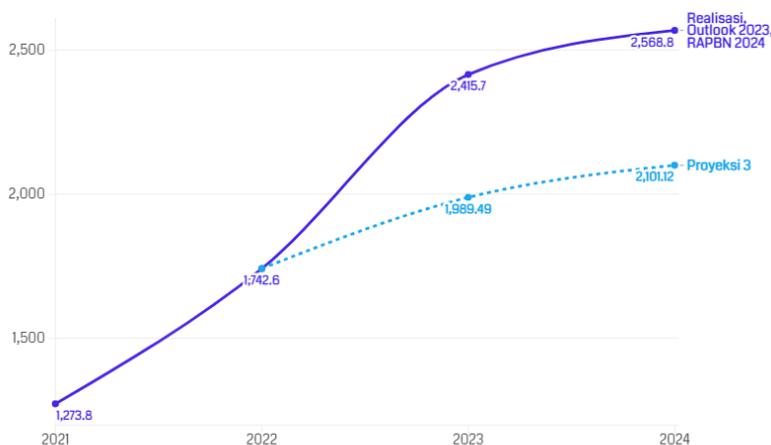
Sayangnya, dari perbandingan Himpunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2024 dan rincian APBN tahun-tahun sebelumnya, output program ini tidak banyak berubah. Output prioritas program ini di tahun 2024 diantaranya 4 (empat) unit pasar ikan/sentra kuliner ikan, 1 (satu) pasar ikan bertaraf internasional, 6 (enam) unit pabrik es portabel, 20-unit sarana pengujian mutu, 5 (lima) unit prasarana pengujian mutu, dan 3000 sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP). Tanpa

inovasi atau *extra efforts* dalam pelaksanaan program, maka perlu dikaji ulang urgensi penentuan anggaran di TA 2024 tersebut.

Pengukuran kinerja program ini salah satunya dilihat dari pencapaian nilai ekspor komoditas kelautan perikanan. **Pencapaiannya selama 2020-2022 tidak memberikan hasil yang optimal.** Pasalnya, target nilai ekspor hasil perikanan yang tercantum dalam Renstra KKP 2020-2024 masing-masing tahun adalah USD6,17 miliar; USD6,63 miliar; USD7,13 miliar; USD7,66 miliar; USD8,00 miliar. Sementara itu, **pencapaiannya di tahun 2022 hanya sebesar 87,51% atau USD7,13 miliar.** Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang hanya USD5,72 miliar, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 9,09%. Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2022 berkontribusi sebesar 2,44% terhadap nilai ekspor nasional tahun 2022 sebesar USD291,90 miliar atau 2,58% terhadap nilai ekspor non migas tahun 2022 yakni sebesar USD275,91 miliar (BPS, 2023).

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Sebesar Rp2.568,80 miliar – Outcome Program Belum Optimal

Gambar 2. Proyeksi Belanja Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dalam miliar Rupiah



Sumber: Kemenkeu (NK RAPBN 2024). 2023; Renstra KKP 2020-2024; data diolah

dapat diproyeksikan nilai belanja program ini di tahun 2024, yaitu sebesar Rp2.101,12 miliar (Gambar 2). Namun demikian, dalam RAPBN 2024 dialokasikan belanja program sebesar Rp2.568,8 miliar. Berdasarkan studi atas Himpunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2024 diketahui bahwa KKP merencanakan beberapa program untuk meningkatkan produksi tahun 2024 nanti, diantaranya adalah Kampung Nelayan Maju (Kalaju), revitalisasi tambak, pembangunan pelabuhan

Gambar 3. Proyeksi Belanja Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dalam miliar Rupiah



Sumber: Kemenkeu (NK RAPBN 2024). 2023; Renstra KKP 2020-2024; data diolah

Program ini berupaya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan dan kelautan, baik dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun produksi garam. Sayangnya, **capaian produksi perikanan dan kelautan di tahun 2022 sebesar 24.87 juta ton (Laporan Kinerja KKP 2022) belum optimal (target produksi 2022 29,42 juta ton).** Sementara itu, target capaian produksi tahun 2024 sebesar 32,75 juta ton (Renstra KKP 2020-2024).

Berdasarkan target dan capaian produksi perikanan dalam Renstra KKP 2020-2024, dapat diproyeksikan nilai belanja program ini di tahun 2024, yaitu sebesar Rp2.101,12 miliar (Gambar 2). Namun demikian, dalam RAPBN 2024 dialokasikan belanja program sebesar Rp2.568,8 miliar. Berdasarkan studi atas Himpunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2024 diketahui bahwa KKP merencanakan beberapa program untuk meningkatkan produksi tahun 2024 nanti, diantaranya adalah Kampung Nelayan Maju (Kalaju), revitalisasi tambak, pembangunan pelabuhan berskala internasional, dan penyaluran sarana dan prasarana bagi petani garam. Dengan jumlah alokasi anggaran yang jauh melebihi angka yang diperlukan untuk mencapai target tersebut, diharapkan kegiatan prioritasnya dapat berdampak positif secara signifikan bagi produksi perikanan dan kelautan.

Program Diklat dan Vokasi Sebesar Rp372,30 miliar – Target Menurun, Namun Anggaran Meningkat

Sesuai dengan namanya, program ini berupaya memberikan pendidikan dan

pelatihan bagi sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Kegiatan program ini meliputi 1) Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan 2) Pendidikan Kelautan dan Perikanan. **Anggaran yang dialokasikan untuk program ini** hanya sebesar 5,28% dari total anggaran KKP RAPBN tahun 2024 atau sebesar **Rp372,30 miliar**. Alokasi tersebut **meningkat dari outlook TA 2023** sebesar Rp320 miliar. **Target jumlah personil yang akan dilatih dan dididik di tahun 2024 sebanyak 38.643 orang**. Angka tersebut **menurun dari jumlah personil tahun 2023 sebesar 40.202 orang** (Kemenkeu, 2023/Himpunan RKA K/L TA 2024). Dengan menggunakan target personil yang akan dilatih dan dididik sebagai dasar penentuan anggaran, maka proyeksi anggaran tahun 2024 menunjukkan angka Rp331,65 miliar. Angka proyeksi tersebut lebih rendah dari alokasi RAPBN 2024 (Gambar 3). Dengan alokasi anggaran Rp372,30 miliar diharapkan terdapat peningkatan jenis pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh KKP di tahun 2024 ke depan.

Program Kualitas Lingkungan Hidup Sebesar Rp103,6 miliar – Strategi Perlindungan Lingkungan Hidup Perairan Perlu Gebrakan

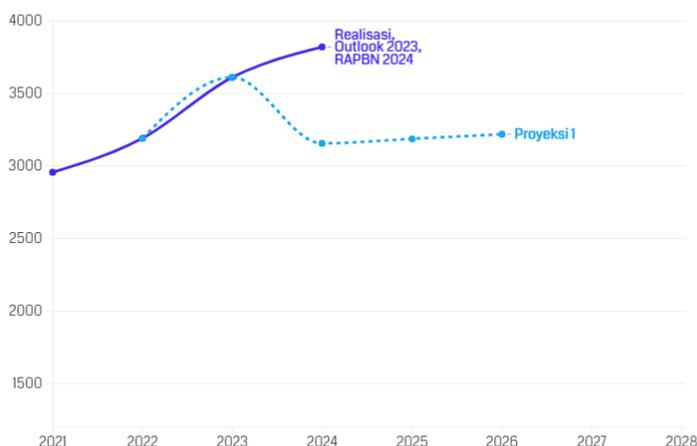
Gambar 4. Proyeksi Belanja Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam miliar Rupiah



Sumber: Kemenkeu (NK RAPBN 2024), 2023; Renstra KKP 2020-2024; data diolah

Sesuai Renstra KKP 2020-2024, sasaran program ini diantaranya: 1) meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan; 2) meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan; 3) meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali; dan 4) kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat. Target luasan kawasan konservasi yang dikelola tahun 2023-2024 masing-masing adalah 29,00 juta ha dan 29,30 juta ha. **Dengan menggunakan analogi bahwa luas kawasan konservasi merupakan parameter penentuan belanja program, maka belanja program ini diproyeksi untuk TA 2024 sebesar Rp72,42 miliar**. Namun dalam dokumen RAPBN 2024 disampaikan bahwa **anggaran program kualitas lingkungan hidup KKP adalah sebesar Rp103,6 miliar** (Gambar 4). Program ini merencanakan output baru berupa Gerakan Bulan Cinta Laut di 27 lokasi pada tahun 2024, namun kesesuaian output program dengan sasaran program perlu dicermati agar tetap efektif dan efisien

Gambar 5. Proyeksi Belanja Program Dukungan Manajemen dalam miliar Rupiah



Source: Kemenkeu (NK RAPBN 2024), 2023; Renstra KKP 2020-2024; data diolah

Program Dukungan Manajemen Sebesar Rp3.820,4 miliar

Sasaran program ini adalah terwujudnya birokrasi KKP yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel. Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kementerian. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas

dan fungsi utamanya. Program ini merupakan syarat minimal berjalannya layanan publik bagi masyarakat. Semakin luas cakupan layanan kementerian, maka alokasi anggaran dalam program ini semakin besar. **Alokasi pagu anggaran bagi KKP untuk program ini meningkat dari outlook APBN 2023 sebesar Rp3.611 miliar menjadi Rp3.820,4 miliar untuk tahun 2024.**

Kesimpulan

Dari perbandingan antara proyeksi belanja program dan RAPBN 2024 KKP tiap program, ditemui bahwa nilai yang rencananya dialokasikan untuk KKP lebih tinggi dari proyeksi PA3KN. Hal ini menyusul kebijakan pembangunan nasional yang dituangkan dalam RKP 2024 yaitu penguatan daya saing usaha melalui meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan serta dukungan penetapan sektor pesisir dan kelautan dalam pembangunan rendah karbon melalui pengelolaan karbon biru (*blue economy*). Saat ini masih terlalu dini untuk melihat perencanaan KKP terkait kedua kebijakan tersebut, diharapkan dalam pembahasan anggaran 2024 dengan DPR nanti telah terbentuk strategi konkret dari KKP yang merupakan gebrakan yang layak didanai lebih dan tidak hanya program yang serupa dengan periode sebelumnya.

Referensi

1. KKP. 2020. *PermenKP No. 57 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024*
2. KKP. 2023. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022*
3. Kemenkeu. 2023a. *Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024*
4. Kemenkeu. 2023b. *Buku III Himpunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2024*
5. Kemenkeu. 2022. *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*

Diterbitkan oleh Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara/PA3KN (sebelumnya Pusat Kajian Anggaran), Agustus 2023.

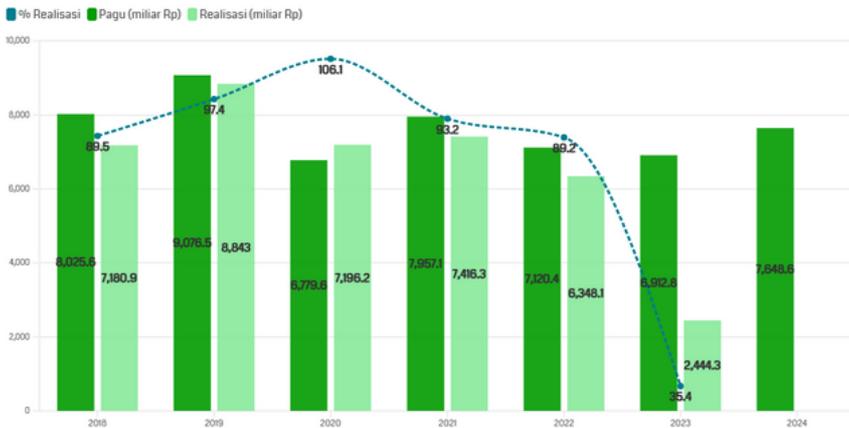
Disclaimer: Kajian ini **tidak bertujuan untuk mendorong penambahan anggaran**, namun ditujukan pada pembahasan anggaran yang lebih efektif, terperinci, dan terarah pada pencapaian tujuan pembangunan.

BUDGET HIGHLIGHTS

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK)
BA 029

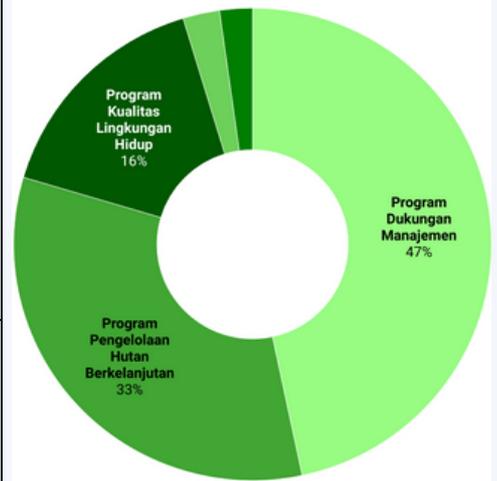
RAPBN TA 2024
Rp7.648,6 miliar

Perkembangan Pagu dan Realisasi



RAPBN 2024 Berdasarkan Program

- Program Dukungan Manajemen (47%)
- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (33%)
- Program Kualitas Lingkungan Hidup (16%)
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (2.5%)
- Program Ketahanan Bencana dan Pembahasan Iklim (2.2%)

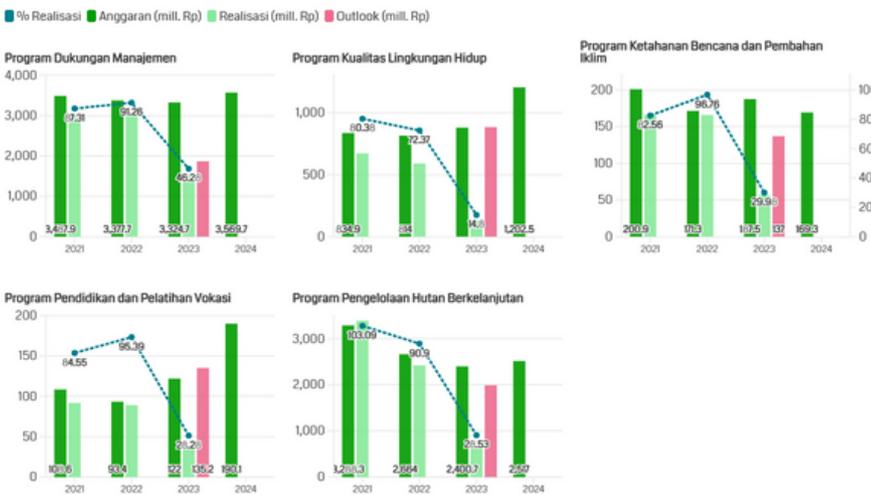


Created with Datawrapper

Sumber:

- Kemenkeu, 2023. *Nota Keuangan RAPBN TA 2024*
- Kemenkeu, 2023. *Himpunan RKAKL TA 2024*
- Kemenkeu. *Data Rincian APBN, berbagai tahun*
- Kemenkeu, 2023. *Laporan Realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN TA 2023*

Perkembangan Anggaran dan Realisasi per Program



Sumber: Kemenkeu, 2023-2024 • Angka realisasi 2023 merupakan realisasi hingga semester I TA 2023.

Perkembangan Pagu Anggaran Berdasarkan Program

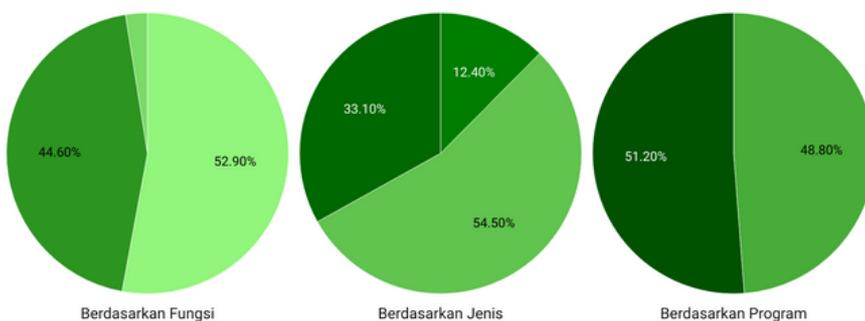
dalam miliar Rupiah

| Tahun | Program Dukungan Manajemen | Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Program Kualitas Lingkungan Hidup | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
|-------|----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|
| 2021 | 3,487.87 | 200.95 | 834.93 | 108.58 | 3,288.26 | 36.53 |
| 2022 | 3,377.67 | 171.35 | 814.04 | 93.4 | 2,663.96 | 0 |
| 2023 | 3,324.67 | 187.47 | 877.91 | 122.01 | 2,400.73 | 0 |
| 2024 | 3,569.7 | 169.3 | 1,202.5 | 190.1 | 2,517 | 0 |

Created with Datawrapper

Alokasi Anggaran 2023 dan Penggolongannya

- Perindungan Lingkungan Hidup
- Ekonomi
- Pendidikan
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Belanja Modal
- Program teknis
- Program generik



Created with Datawrapper

Alokasi APBN 2023 Berdasarkan Eselon I

dalam miliar Rupiah

- Ekonomi
- Pendidikan
- Perindungan Lingk. Hidup
- Belanja Barang
- Belanja Modal
- Belanja Pegawai

Berdasarkan Fungsi

Sekretariat Jenderal

457.73

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

575.4

Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

299.52

Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim

290.08

Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

393.08

Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

1,364.2

Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

354.21

Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

1,667.78

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

376.2

Badan Penyelulhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

173.11

Berdasarkan Jenis Belanja

Badan Penyelulhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

359.59

Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

843.08

724.97

Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

196.78

Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

1,142.75

187.74

Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

357.75

Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim

230.61

Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

251.01

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

440.51

Sekretariat Jenderal

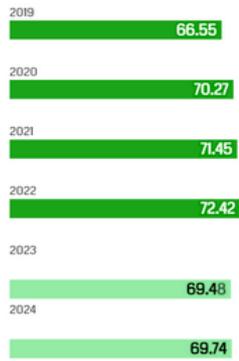
324.08

Created with Datawrapper

Capaian dan Target Output Prioritas 2019-2024

■ Realisasi/Capaian ■ Target

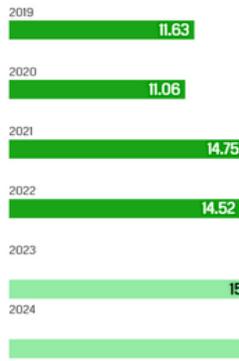
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)



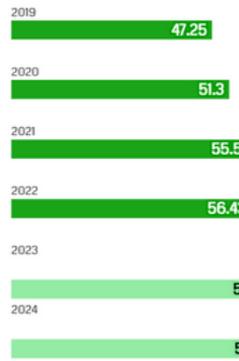
Laju Deforestasi (juta ha/tahun)



Ekspor Kayu Olahan (miliar USD)



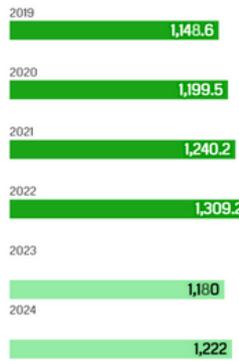
Produksi Kayu Bulat (juta m3)



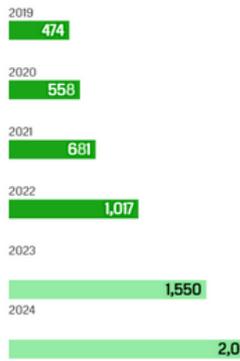
Ekspor Tumbuhan Satwa Liar/TSL (miliar Rp)



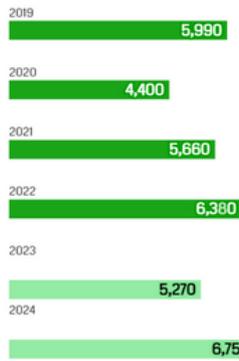
Kontribusi LHK pada PDB (miliar Rp)



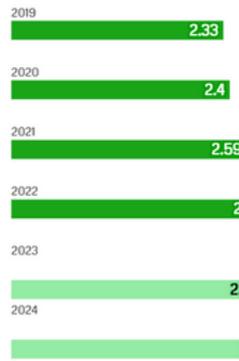
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (ribu ton)



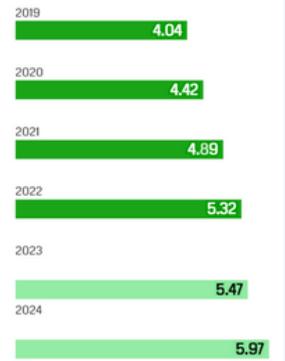
PNBP LHK (miliar Rp)



Tanah Objek Reforma Agraria/TORA (kumulatif, juta ha)



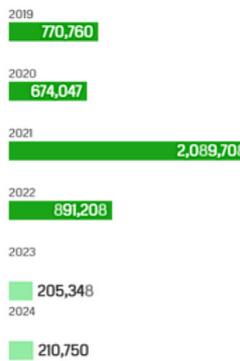
Luas Akses Kelola Perhutanan Sosial (kumulatif, juta ha)



Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (ribu ha)



Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 (ton)

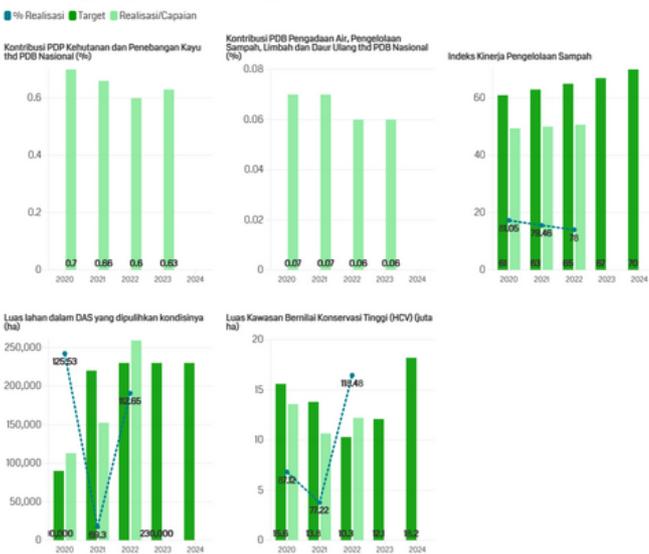


Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi (ha)



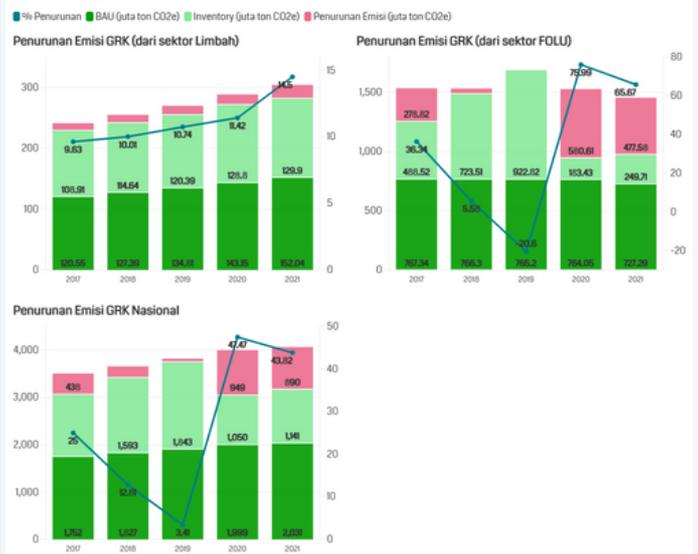
Sumber: Kemenkeu, 2023 (Himpunan RKA K/L TA 2024)

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama



Sumber: Renstra Kementerian 2020-2024; Lakin Kementerian Tahun 2020-2022; BPS; 2023 • Angka realisasi 2023 merupakan realisasi hingga semester I 2023.

Perkembangan Capaian Penurunan Emisi GRK



Sumber: Renstra Kementerian 2020-2024; Lakin Kementerian Tahun 2020-2022; BPS; 2023 • Angka realisasi 2023 merupakan realisasi hingga semester I 2023.



Review Belanja Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun Anggaran 2024

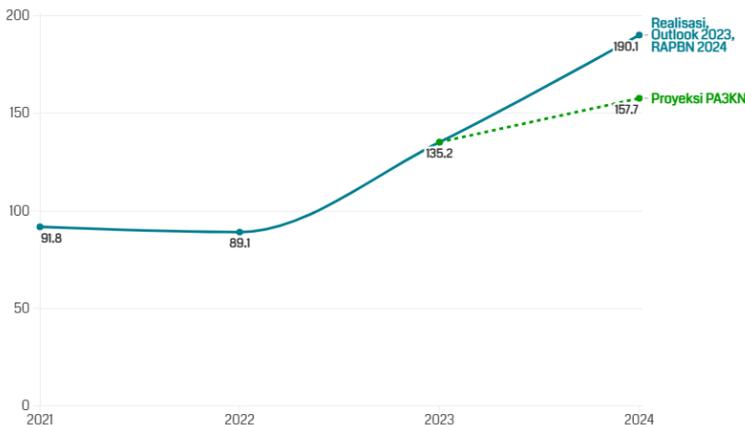
oleh

Marihot Nasution, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Kajian ini mereview penentuan kebijakan pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tahun anggaran 2024. Review dilakukan dengan menghubungkan pencapaian target jangka menengah instansi yang ditetapkan melalui rencana strategis (Renstra) kementerian/lembaga (K/L), dan melakukan penghitungan proyeksi biaya kebijakan berdasarkan target renstra K/L; membandingkan antara anggaran pagu RAPBN 2024 dan proyeksi biaya kebijakan; serta mengkaji kebijakan yang ditetapkan oleh K/L untuk menguji komitmen dan konsistensinya dalam mencapai target pembangunan.

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Sebesar Rp190,1 miliar – Anggaran Naik Perlu Diiringi dengan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan

Gambar 1. Proyeksi Belanja Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dalam miliar Rupiah



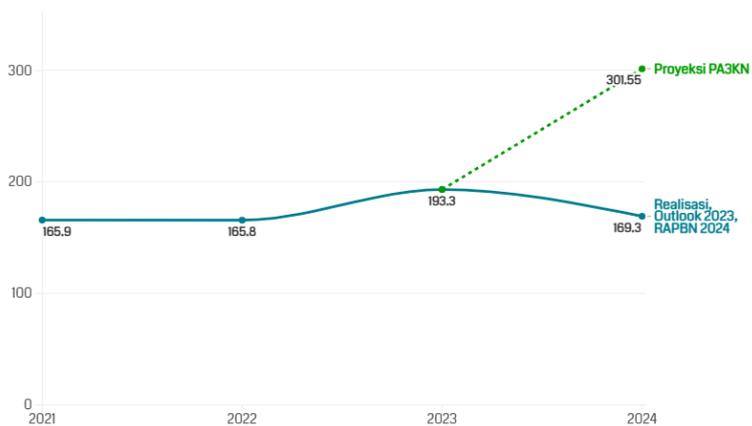
Sumber: Kemenkeu (NK RAPBN 2024), 2023; Renstra KKP 2020-2024; data diolah

Pagu anggaran program ini di tahun 2024 adalah sebesar Rp190,1 miliar bertambah sebesar Rp54,9 miliar dari outlook TA 2023. Program ini memiliki output prioritas berupa 1) pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan SMK kehutanan negeri dan 2) Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mendukung industri, kehutanan, dan wirausaha masyarakat untuk 7.840 orang. Dalam Renstra KLHK 2020-2024 disampaikan bahwa jumlah target peserta pelatihan ataupun pendidikan dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan signifikan. Hal ini disebabkan dalam

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terdapat batas maksimal kapasitas peserta tiap tahunnya. Namun dalam Renstra KLHK 2020-2024 juga menetapkan target berupa jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Indikator ini ditargetkan dari tahun 2020 sampai 2024 masing-masing sebagai berikut 2020, 518 unit; 2021, 730 unit; 2022, 840 unit; 2023, 960 unit; dan 2024, 1080 unit. Selain itu, KLHK juga mengukur indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK dan dari tahun ke tahun pencapaian indeks ini menunjukkan tren positif (2020, 89,95; 2021, 89,88; dan 2022, 89,98) dan melebihi targetnya. Mengikuti tren jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup, PA3KN memproyeksi bahwa pagu anggaran program ini dapat mencapai Rp157,70 miliar, nilai yang lebih rendah dari pagu RAPBN 2024. Namun dengan dasar indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK, maka peningkatan pagu anggaran KLHK untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi memiliki indikasi digunakan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing SDM LHK dengan baik. Diharapkan peningkatan pagu anggaran program ini menjadi Rp190,1 miliar dapat memberi peningkatan produktivitas SDM dan/atau kesadaran SDM berbudaya lingkungan hidup.

Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Rp169.30 miliar – Urgensi Belum Tercermin

Gambar 2. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dalam miliar Rupiah



Sumber: Kemenkeu (NK RAPBN 2024), 2023; Renstra KKP 2020-2024; data diolah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengintegrasikan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam rencana pembangunannya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi komitmen internasional menurunkan suhu bumi sebesar 1,5°C dalam menghadapi perubahan iklim. KLHK selaku *focal point* atas komitmen tersebut sekaligus kementerian teknis yang mengelola salah satu sektor penyumbang emisi terbesar, yaitu kehutanan dan penggunaan lahan (*Forestry and Land Use/FOLU*) justru tidak memprioritaskan upaya penanganan perubahan iklim. Hal ini

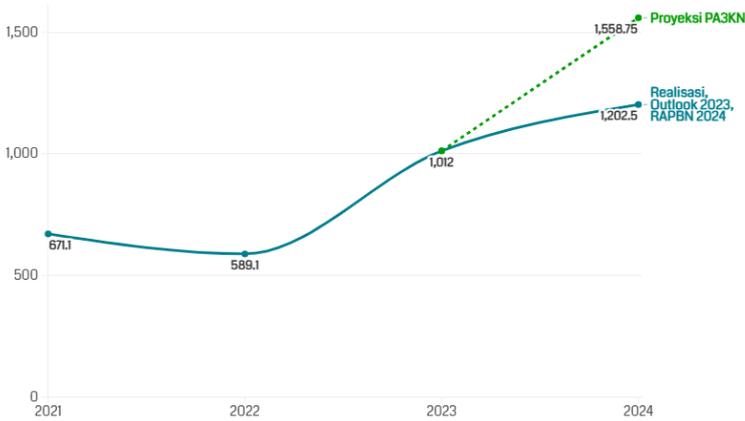
tercermin dalam **Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang memiliki pagu anggaran TA 2024 hanya sebesar Rp169,30 miliar. Angka tersebut lebih rendah dari outlook 2023 sebesar Rp193,3 miliar. PA3KN memproyeksi bahwa untuk pencapaian target penurunan laju deforestasi (salah satu penyumbang emisi GRK) diperlukan pagu anggaran sebesar Rp301,55 pada tahun 2024 nanti.** Hal ini untuk memenuhi ambisi penurunan laju deforestasi yang meningkat dari tahun 2022 sebesar 0,11 juta ha/tahun menjadi sebesar 0,20 juta ha/tahun di tahun 2023 dan 2024. Kenyataannya, di tahun 2023 hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp193,3 miliar dan hanya Rp169,3 miliar di tahun 2024. Hal ini menunjukkan urgensi menghadapi perubahan iklim masih belum tercermin dalam perencanaan anggaran dan kegiatan prioritas. Padahal upaya menghadapi perubahan iklim memerlukan dana yang tidak sedikit. Kebutuhan pendanaan untuk target penurunan emisi bersyarat dari 2018-2030 sekitar USD285 miliar dan untuk target tidak bersyarat/BAU sekitar USD281 miliar atau setara dengan Rp4.002,4 triliun apabila dikonversikan dengan kurs Rp14.250/USD (Ulfa, dkk; 2023). Sejauh ini, rata-rata alokasi anggaran belanja untuk perubahan iklim (termasuk aksi mitigasi dan adaptasi) saat ini hanya senilai Rp102,65 triliun per tahun sejak 2018 hingga 2020 (Kemenkeu, 2020).

Untuk tahun 2024, program ini memiliki output prioritas seperti pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan melibatkan 2.175 kelompok masyarakat, Program Kampung Iklim (Proklam), dan penurunan emisi GRK sebesar 17,47% dari BAU melalui penghitungan emisi dan perdagangan karbon (NEK).

Program Kualitas Lingkungan Hidup Sebesar Rp1,202.50 miliar – Anggaran Optimis, Target Pesimis

Keberhasilan program ini diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan indeks komposit/gabungan dari beberapa indeks, diantaranya indeks kualitas udara, air, lahan, dan air laut. Dalam mencapai angka indeks yang optimal, KLHK memiliki beberapa output prioritas seperti 1) penguatan sistem peringatan dini bencana melalui pemasangan sistem pemantauan kualitas air dan udara di beberapa wilayah; 2) pembangunan fasilitas pengolahan limbah; 3) restorasi gambut; dan 4) peningkatan pengawasan atas badan usaha terhadap ketaatan pada hukum dan regulasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. **Sejauh ini, pencapaian IKLH menunjukkan tren positif. Dari tahun 2020 tercatat IKLH sebesar 70,27 menjadi 72,42 di tahun 2022. Namun untuk tahun 2023 dan 2024, target IKLH lebih rendah dari capaian tahun-tahun sebelumnya, yaitu 69,48 di tahun 2023, dan 69,74 di tahun 2024. Dengan target tersebut tampak bahwa KLHK tidak terlalu optimis akan pencapaiannya.**

Gambar 3. Program Kualitas Lingkungan Hidup
dalam miliar Rupiah



Sumber: Kemenkeu (NK RAPPB 2024), 2023; Renstra KKP 2020-2024; data diolah

anggaran telah terintegrasi antara target dan berapa biaya yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Sebesar Rp2.517 miliar – Potensi Hutan Belum Sepenuhnya Dioptimalkan

Gambar 4. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
dalam miliar Rupiah



Sumber: Kemenkeu (NK RAPPB 2024), 2023; Renstra KKP 2020-2024; data diolah

Dari sisi anggaran, target tersebut dicerminkan melalui *outlook* 2023 sebesar Rp1.012,00 miliar dan pagu RAPPB 2024 sebesar Rp1.202,50 miliar. Penentuan anggaran yang sangat optimis dibandingkan realisasi tahun 2022 Rp589,10 miliar. Mengikuti optimisme dalam penentuan pagu anggaran, **PA3KN memproyeksikan bahwa pagu anggaran untuk program Kualitas Lingkungan Hidup mencapai Rp1.558,75.** Namun, pagu anggaran TA 2024 masih lebih rendah dari angka proyeksi tersebut. Hal ini **perlu dikaji ulang apakah dalam merencanakan output prioritas dan pagu**

Program ini dapat berdampak pada tingginya kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. **KLHK menargetkan PDK LHK tahun 2024 sebesar Rp1.222,0 miliar.** **PA3KN memproyeksikan bahwa untuk mencapai kontribusi PDB tersebut diperlukan anggaran sebesar Rp2.799,91 miliar.** Namun pagu anggaran program ini hanya sebesar Rp2.517 miliar, lebih rendah dari proyeksi.

Hal ini memperparah situasi dimana rendahnya potensi hutan yang belum dioptimalkan. Pasalnya hutan di Indonesia

seluas 120,3 juta hektare, PDB sektor kehutanan hanya 0,6%. Kawasan hutan tidak memberikan manfaat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Akibatnya hutan dikonversi menjadi lahan yang lebih menguntungkan. Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan rata-rata petani hutan menggarap lahan seluas 0,2-0,4 hektare. Padahal kawasan hutan 120,3 juta hektare atau 60 persen dari luas daratan Indonesia. Kecilnya usaha sektor kehutanan tercermin dalam sumbangannya kepada PDB usaha kahuna yang hanya 0,6% per tahun. Sementara sektor pertanian yang menguasai lahan kurang dari 20 juta hektare sumbangan ke PDB sebesar 9,22% (BPS, 2023).

Program Dukungan Manajemen Sebesar Rp3.569,70 miliar

Sasaran program ini adalah terwujudnya birokrasi KLHK yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel. Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kementerian. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya. Program ini merupakan syarat minimal berjalannya layanan publik bagi masyarakat. Semakin luas cakupan layanan kementerian, maka alokasi anggaran dalam

program ini semakin besar. **Alokasi pagu anggaran bagi KLHK untuk program ini meningkat dari outlook APBN 2023 sebesar Rp3.404,90 miliar menjadi Rp3.569,70 miliar untuk tahun 2024.**

Kesimpulan

Dari perbandingan antara proyeksi belanja program dan RAPBN 2024 KLHK tiap program, ditemui bahwa pagu anggaran untuk KLHK bervariasi jika dibandingkan dengan outlook PA3KN. Program yang memiliki dampak positif bagi lingkungan dan mendukung komitmen internasional (Paris Agreement) justru direncanakan lebih rendah dari outlook 2023. Begitu pula program yang mendukung pengelolaan hutan demi peningkatan kontribusi sektor usaha lingkungan hidup dan kehutanan pada PDB nasional. Sementara itu, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Kualitas Lingkungan Hidup meningkat jumlahnya dari outlook 2023. Peningkatan anggaran ini perlu tercermin dalam pencapaian output prioritas di 2024 nanti.

PA3KN memproyeksikan bahwa agar pencapaian output prioritas dapat optimal maka pagu anggaran 2024 perlu ditingkatkan untuk Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; Program Kualitas Lingkungan Hidup; dan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Jika ketiga program ini diberikan pagu anggaran yang rendah maka upaya KLHK dalam mencapai output prioritas tidak akan berdampak optimal. Sementara untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pagu anggaran melebihi proyeksi PA3KN. Untuk itu program ini perlu diikuti dengan gebrakan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan pada peserta nantinya.

Referensi

1. KLHK. 2020. *Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024*
2. KLHK. 2023. *Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022*
3. Kemenkeu. 2023a. *Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024*
4. Kemenkeu. 2023b. *Buku III Himpunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2024*
5. Kemenkeu. 2022. *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*
6. BPS. 2023. *Seri 2020] Distribusi PDB triwulanan Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen). Data online. Diakses dari www.bps.go.id*
7. Sugiharto, A. 2021. *Arah Kebijakan Multiusaha Kehutanan. Artikel online. <https://www.forestdigest.com/detail/1514/kebijakan-multiusaha-kehutanan>*
8. Anggraini, U., Wijaya, S., & Lathif, S. 2023. *Tinjauan Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim Di Indonesia. Journal of Law, Administration, and Social Science, 3(1), 72–92. Diakses dari <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.411>*
9. Kemenkeu. 2020. *Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020. Laporan. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/CBT-NATIONAL-2018-2020.pdf>*

Diterbitkan oleh Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara/PA3KN (sebelumnya Pusat Kajian Anggaran), Agustus 2023.

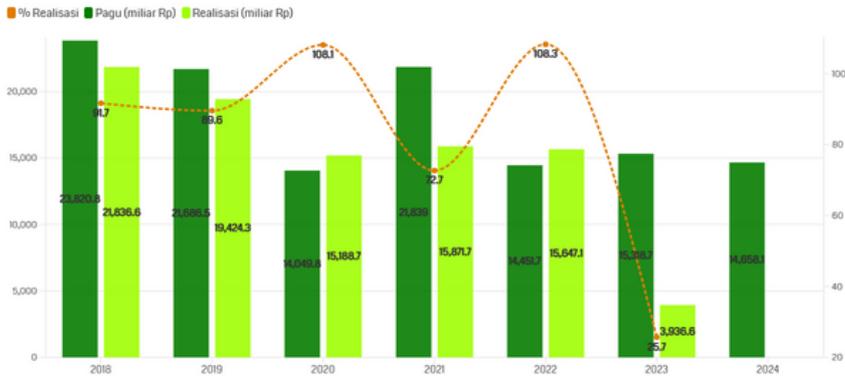
Disclaimer: Kajian ini **tidak bertujuan untuk mendorong penambahan anggaran**, namun ditujukan pada pembahasan anggaran yang lebih efektif, terperinci, dan terarah pada pencapaian tujuan pembangunan.

BUDGET HIGHLIGHTS

KEMENTERIAN PERTANIAN (KEMENTAN) BA 018

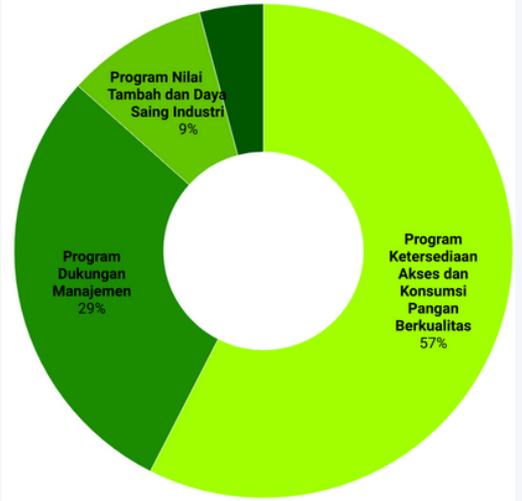
RAPBN TA 2024
Rp 14.658,1 miliar

Perkembangan Pagu dan Realisasi



RAPBN 2024 Berdasarkan Program

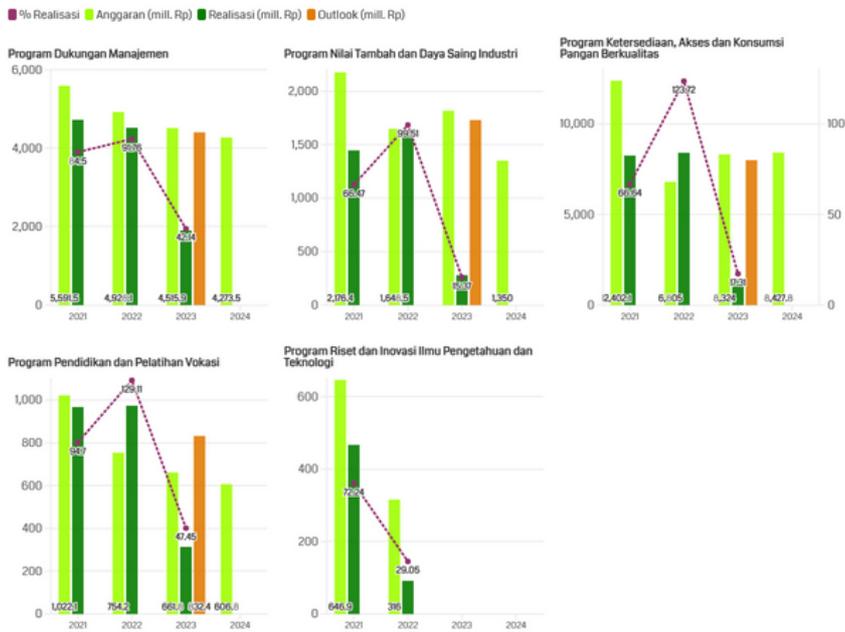
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (57%)
- Program Dukungan Manajemen (29%)
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (9%)
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (4,1%)



Sumber:

- Kemenkeu, 2023. Nota Keuangan RAPBN TA 2024
- Kemenkeu, 2023. Himpunan RKAKL TA 2024
- Kemenkeu. Data Rincian APBN, berbagai tahun
- Kemenkeu, 2023. Laporan Realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN TA 2023

Perkembangan Anggaran dan Realisasi per Program



Sumber: Kemenkeu, 2023-2024 • Angka realisasi 2023 merupakan realisasi hingga semester I TA 2023.

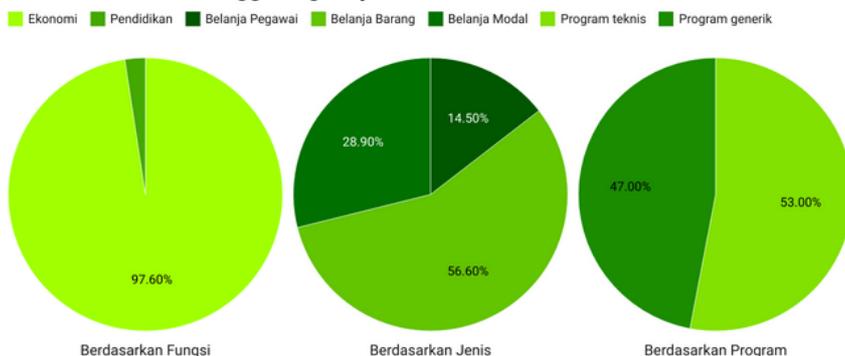
Perkembangan Pagu Anggaran Berdasarkan Program

dalam miliar Rupiah

| Tahun | Program Dukungan Manajemen | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
|-------|----------------------------|---|--|---|--|
| 2021 | 5.591,48 | 12.402,08 | 2.176,37 | 1.022,15 | 646,9 |
| 2022 | 4.928,07 | 6.805 | 1.648,52 | 754,18 | 315,98 |
| 2023 | 4.515,94 | 8.324,02 | 1.816,94 | 661,77 | 0 |
| 2024 | 4.273,5 | 8.427,8 | 1.350 | 606,8 | 0 |

Created with Datawrapper

Alokasi 2023 dan Penggolongannya



Created with Datawrapper

Alokasi APBN 2023 Berdasarkan Eselon I



Created with Datawrapper

Capaian dan Target Output Prioritas 2019-2024

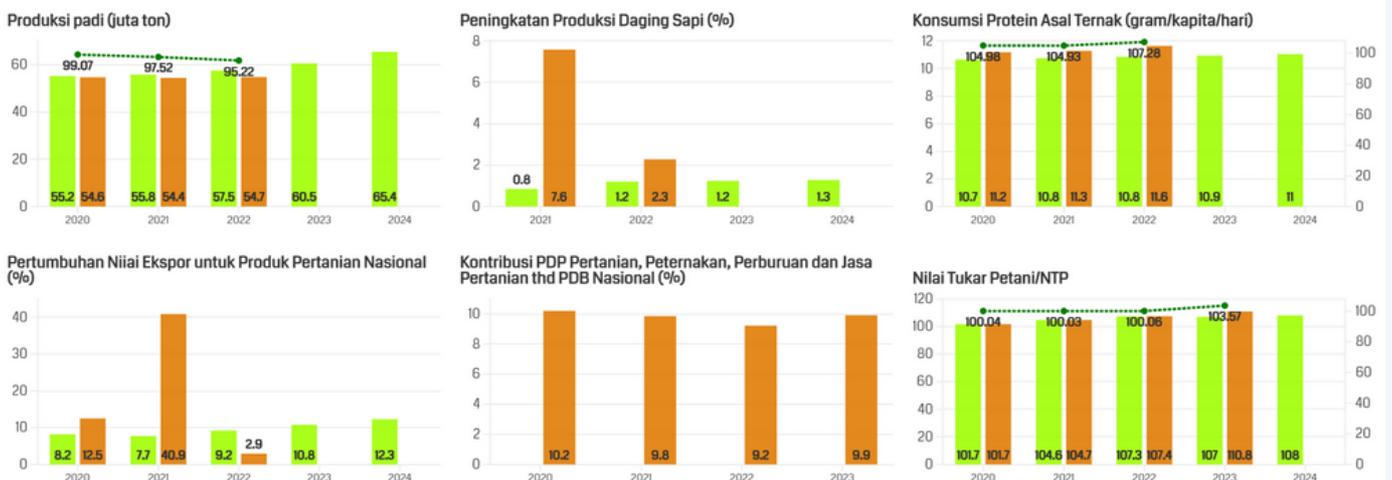
■ Realisasi/Capaian ■ Target



Sumber: Kemenkeu, 2023 (Himpunan RKA K/L TA 2024)

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama

■ % Realisasi ■ Target ■ Realisasi/Capaian



Sumber: Renstra Kementerian 2020-2024; Lakin Kementan Tahun 2020-2022; BPS; 2023 • Angka realisasi 2023 merupakan realisasi hingga semester I 2023.



Review Belanja Program Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024

oleh

Marihot Nasution, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Kajian ini mereview penentuan kebijakan pagu anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tahun anggaran 2024. Review dilakukan dengan menghubungkan pencapaian target jangka menengah instansi yang ditetapkan melalui rencana strategis (Renstra) kementerian/lembaga (K/L), dan melakukan penghitungan proyeksi biaya kebijakan berdasarkan target renstra K/L; membandingkan antara anggaran pagu RAPBN 2024 dan proyeksi biaya kebijakan; serta mengkaji kebijakan yang ditetapkan oleh K/L untuk menguji komitmen dan konsistensinya dalam mencapai target pembangunan.

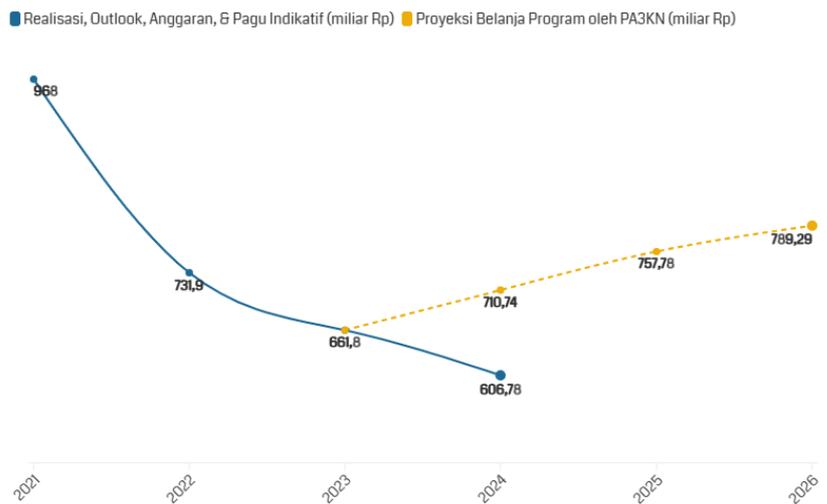
Program Diklat dan Vokasi Sebesar Rp606,78 miliar – Anggaran Menurun Meskipun Target Makin Tinggi

Program ini tersedia sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia (SDM) sektor pertanian melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. SDM pertanian yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya di lapangan sehingga dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraannya. Di samping itu, SDM pertanian terlatih juga dapat berkontribusi dalam upaya mendorong kemajuan pertanian. SDM pertanian terdiri atas petani, penyuluh pertanian, dan pengajar (guru, dosen, dan widyaiswara) di bidang pertanian.

Indikator keberhasilan dari program ini adalah persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya. Peningkatan kapasitas tersebut ditunjukkan dengan diterapkannya ketrampilan yang diperoleh dari diklat di lapangan. Kesempatan diklat diberikan kepada seluruh SDM pertanian. Jika diklat diberikan kepada petani maka ketrampilan yang diperoleh diterapkan dalam kegiatan bertani sehari-hari. Namun, jika diklat diberikan pada penyuluh ataupun pengajar pertanian, maka ketrampilan yang diperoleh akan disampaikan pada petani di wilayah kerjanya sehingga petani dapat menerapkan ketrampilan tersebut di proses bertani. Dalam Renstra Kementan 2020-2024 ditetapkan **nilai persentase SDM yang meningkat kapasitasnya tiap tahun adalah: 2021, 75%; 2022, 80%; 2023, 85%; dan 2024, 90%**. Dengan ditetapkannya target indikator tersebut maka dapat dijadikan pedoman penentuan belanja program dengan menggunakan parameter jumlah SDM pertanian yang mengikuti diklat dan/atau meningkat kapasitasnya. Jika **belanja Program Diklat Vokasi diproyeksi mengikuti target indikator kinerjanya maka anggaran perlu mencapai Rp710.74 miliar**. Namun demikian, dalam RAPBN 2024 program ini hanya menerima **pagu anggaran sebesar Rp606,78 miliar**. Dari proyeksi dan alokasi pagu anggaran terdapat selisih sebesar Rp103.96 miliar. Selisih tersebut cukup tinggi, sehingga patut dipertanyakan bagaimana strategi Kementan dhi. BPPSDMP untuk mencapai indikator kinerja tahun 2024 nantinya. Selain itu, seperti dikatakan sebelumnya pagu anggaran 2024 yang diberikan bagi Program Diklat dan Pendidikan Vokasi ini merupakan penurunan dari tahun 2023. Penurunan anggaran tersebut juga terjadi di tahun 2021 dan 2022 (Gambar 1). Padahal target dalam Renstra Kementan menunjukkan peningkatan dan jumlah SDM pertanian juga tidak mengalami pengurangan, bahkan terdapat kemungkinan jumlah SDM tersebut bertambah hingga 2024.

Meskipun alokasi belanja program menurun, namun Lakin Kementan dan Lakin BPPSDMP tahun 2021-2022 melaporkan bahwa indikator kinerjanya tercapai bahkan melampaui target atau pencapaian >100%. Artinya, terdapat upaya yang berjalan efektif untuk mencapai target yang ditetapkan. Disinyalir upaya tersebut diantaranya penggunaan media pelatihan dan pendidikan secara *online/daring* menjadi pilihan peningkatan kompetensi SDM pertanian melalui kegiatan yang tetap dapat dilaksanakan tanpa terkendala jarak, ruang dan waktu. Selain itu, media ini memungkinkan menjangkau peserta kegiatan lebih banyak daripada dilakukan secara *luring/offline*. Kedepannya, pelaksanaan diklat secara *online* perlu dipertimbangkan dengan tanpa mengurangi kualitas pengajaran dan materi guna mendukung pelaksanaan “*spending better*” demi efektivitas belanja program, mengingat anggaran tahun 2024 diperkirakan menurun lagi.

Gambar 1. Proyeksi Pagu Belanja Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

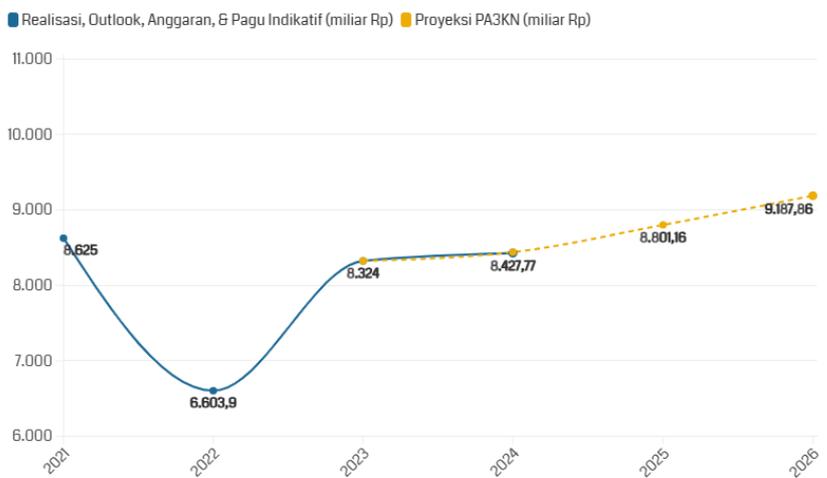


Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas Sebesar Rp8.427,77 miliar – On-track Dalam Mencapai Target

Dalam RAPBN 2024 disampaikan bahwa pagu belanja Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas ini adalah sebesar Rp8.427,77 miliar. Sementara itu, proyeksi yang dilakukan PA3KN menghasilkan angka untuk belanja program ini di tahun 2024 adalah sebesar Rp8.440,42 miliar (Gambar 2). Dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 tidak dinyatakan perubahan kegiatan dalam menjalankan program ini. Selain itu, indikator kinerja program ini dilaporkan dalam Lakin Kementan 2022 telah tercapai atau *on-track* untuk mencapai target jangka menengah di 2024 nanti. Artinya, program ini telah berjalan efektif dalam mencapai target tahunannya.

Gambar 2. Proyeksi Pagu Belanja Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas



Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Namun demikian, jika dievaluasi lebih lanjut, pencapaian indikator kinerja Kementan untuk program ini, menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang belum tercapai target tahun 2024-nya, yaitu persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dan tingkat pemenuhan prasarana pertanian. Rincian atas indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis, capaian 2022: 80,03 persen; target 2024: 81 persen; dan
- b) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian, 2022: 57,94 persen; 2024: 58,07 persen.

Capaian di tahun 2022 untuk persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis disebabkan oleh mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) pada hewan ternak. Oleh Kementan, hadirnya wabah tersebut diatasi dengan vaksinasi, sebanyak 11.536.007 dosis untuk PMK dan 217.622 dosis untuk LSD di wilayah yang terjangkit. Sementara itu, untuk tahun 2023 tidak banyak perubahan aksi dari Kementan dalam upayanya mencapai indikator kinerja tahun 2024 nanti. Upaya yang dilakukan di tahun 2023 diantaranya:

- a) penguatan Posko dan Gugus Tugas penanganan wabah PMK di tingkat nasional/provinsi/kabupaten;
- b) pembatasan lalu lintas ternak melalui koordinasi dengan Satgas Pangan dan instansi lain;
- c) distribusi obat dan vitamin kepada peternak;
- d) penyediaan vaksin sesuai rekomendasi Komisi Obat Hewan yang dilakukan melalui impor maupun produk dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Kementerian Pertanian;
- e) pelatihan penanganan wabah PMK kepada Petugas Kesehatan Hewan, Petugas Inseminator, dan Pelayan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB); serta
- f) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penderasan informasi positif, *leaflet*, video, dan lain-lain.

Untuk indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian seperti pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, lahan, dan irigasi meskipun mencapai target tahunannya, namun masih terdapat banyak kelemahan dalam penyediaannya. Target yang perlu dicapai dalam kegiatan ini cukup rendah yaitu 56,77% prasarana pertanian tersedia. Capaiannya tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Kementerian Pertanian tahun 2024 sebesar 58,07%, maka capaiannya sebesar 99,76%. Rincian prasarana pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian yang disediakan adalah sebagai berikut:

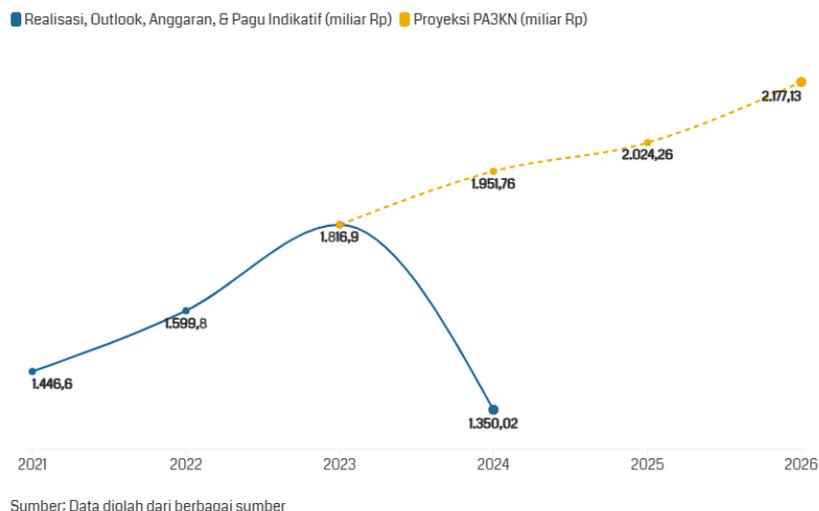
- a) jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor usaha tani target jangka menengah, 5.000.000 ha, baru tercapai hingga 2022, 1.753.259,89 ha (35,07%);
- b) jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor peternakan ditargetkan di tahun 2024 mencapai 1.000.000 ekor, namun hingga tahun 2022 baru tercapai 287.437 ekor (28,74%);
- c) jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan ditargetkan sebanyak 8.250 pelaku usaha di tahun 2024, hingga tahun 2022 baru tercapai sebanyak 5.706 pelaku usaha (69,16%); dan
- d) jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari sektor swasta ditargetkan sebanyak 1.000 pelaku usaha, namun pencapaian hingga 2022 baru sebanyak 708 pelaku usaha (70,8%).

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Sebesar Rp1.350,02 miliar – Anggaran Tidak Berkorelasi pada pencapaian Target Indikator Kinerja

Kinerja program ini diukur salah satunya dengan kontribusinya pada pertumbuhan nilai ekspor hasil pertanian. **Dalam Renstra Kementan 2020-2024 telah ditetapkan target pertumbuhan nilai ekspor dari tahun 2021 hingga 2024, yaitu: 2021 ditetapkan target 7,71%; 2022, 9,21%; 2023, 10,75%; dan 2024, 12,28%.** Dalam dokumen Lakin Kementan 2022 juga disampaikan bahwa realisasi pertumbuhan nilai ekspor baru mencapai 6,90% atau belum mencapai target. Total nilai ekspor pertanian dari 39 komoditas pada tahun 2022 senilai USD42,35 miliar atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilainya senilai USD41,15 miliar. Kontribusi nilai ekspor tertinggi didominasi oleh komoditas perkebunan yang mencapai sekitar 95% dari total nilai ekspor. Komoditas kelapa sawit memberikan kontribusi terbesar dengan nilai USD31,49 miliar atau sekitar 74,35% dari total nilai ekspor. Komoditas lain yang memberikan kontribusi tinggi terhadap nilai ekspor diantaranya: karet senilai USD3,65 miliar, kelapa senilai USD1,72 miliar, kakao senilai USD1,2 miliar dan kopi senilai USD1,15 miliar.

Dalam dokumen RAPBN 2024 ditetapkan pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp1.350,02 miliar. Angka tersebut merupakan nilai anggaran yang diharapkan dapat mencapai target pertumbuhan nilai ekspor sebesar 12,28% di tahun 2024 nanti. Namun dari perhitungan **proyeksi PA3KN, pagu anggaran tersebut jauh dari jumlah yang diperlukan untuk mencapai target.** Jika menggunakan dasar ketercapaian target pertumbuhan nilai ekspor maka **belanja program diproyeksi di angka Rp1.951,76 miliar.** Angka proyeksi

Gambar 3. Proyeksi Pagu Belanja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri



lebih tinggi dari pagu anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan selisih sebesar Rp601,74 miliar. Hal ini dihitung dengan asumsi bahwa jika belanja program direalisasikan sebesar Rp0,0372 miliar (Rp37,2 juta) maka akan menambah nilai ekspor hasil pertanian sebesar USD1 juta. Namun untuk memenuhi asumsi tersebut diperlukan korelasi yang erat antara belanja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan nilai ekspor. Jika angka pagu anggaran Rp1.350,02 miliar menjadi anggaran dalam program ini, maka diperlukan strategi yang terfokus untuk memacu peningkatan ekspor komoditas yang sudah pasti dapat berkontribusi, yaitu subsektor perkebunan.

Program Dukungan Manajemen Sebesar Rp4.273,52 miliar

Sasaran program ini adalah terwujudnya birokrasi Kementan yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel. Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kementerian. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya. Program ini merupakan syarat minimal berjalannya layanan publik bagi masyarakat. Semakin luas cakupan layanan kementerian, maka alokasi anggaran dalam program ini dapat semakin besar. **Alokasi pagu anggaran bagi Kementan untuk program ini menurun dari alokasi APBN 2023 sebesar Rp4.515,9 miliar menjadi Rp4.273,52 miliar untuk tahun 2024.**

Kesimpulan

Proyeksi atas belanja program Kementan menunjukkan bahwa dalam mencapai target Renstra Kementan diperlukan anggaran yang optimal yang memperhatikan beban kerja untuk mencapai indikator kinerja. Proyeksi PA3KN menunjukkan hasil sebagai berikut: belanja Program Diklat Vokasi sebesar Rp710,74 miliar; belanja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri diproyeksi di angka Rp1.960,24 miliar. Kedua program tersebut hasil proyeksinya lebih besar dari angka pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam KEM-PPKF. Menyikapi angka pagu anggaran yang “sedikit” tersebut sebaiknya Kementan berupaya merencanakan kegiatan dalam program ini dengan lebih hati-hati dan terfokus pada tujuan yang ingin dicapai, pada area yang perlu dikembangkan saja. Hal ini merupakan upaya penerapan *spending better* demi efektivitas belanja pemerintah.

Untuk Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas meskipun nilai proyeksi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu sebesar Rp8,440.42 miliar dan pagu anggaran sebesar Rp8427,77 miliar, namun fokus *spending better* tetap perlu diterapkan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa dampak dari program ini sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup penduduk dan kemajuan ekonomi Indonesia.

Referensi

1. Kementan. 2021. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024*
2. Kementan. 2023. *Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2022*
3. Kemenkeu. 2023a. *Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024*
4. Kemenkeu. 2023b. *Buku III Himpunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2024*
5. Kemenkeu. 2022. *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*

Diterbitkan oleh Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara/PA3KN (sebelumnya Pusat Kajian Anggaran), Agustus 2023.

*Disclaimer: Kajian ini **tidak bertujuan untuk mendorong penambahan anggaran**, namun ditujukan pada pembahasan anggaran yang lebih efektif, terperinci, dan terarah pada pencapaian tujuan pembangunan.*



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**PUSAT ANALISIS ANGGARAN
DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**

WWW.PA3KN.DPR.GO.ID
TELP. 021-5715635 FAX. 021-5715635
INSTAGRAM: @PA3KN.BKDPRRI
YOUTUBE: PA3KN BK DPR RI